

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Akbari, Anugerah Rizki, Adery Ardhan Saputro dan Andreas Nathaniel Marbun, 2017, *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, Mappi FH UI, Jakarta
- Ali, Ahmad MD, 2012, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi 1, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Arifin, Mohammad, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Arikunto, Surharsmi, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Atmasasmita, Romli 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (edisi keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Diantha, Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenanda Media Group, Jakarta.
- Dimiyati, Johni, 2013, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Fajar, Mukti., Achmad Yuliyanto, 2010, *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Fuadi, Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuadi, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prennamdeia Group, Jakarta
- Gie, The Liang, 1982, *Teori-teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta, M, 2008, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selecta*, Galang Press, Yogyakarta
- Karnasudirdja, Eddy, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Kompas, Jakarta
- Kelsen, Hans, 2011, *General Theory of Law and State* (Muttaqien, Rasisul, Terjemahan), Nusa Media, Bandung.

- Kusumaatmadja, Mochtar, 1995, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung.
- Mengesti, A Yovita dan L, Bernard, 2014, *Tanya Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Notohamidjojo, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1984, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Radbruch, Gustav, 1950, *Legal Philosophy, In The Legal Philosophies of Lask*, Radbruch and Dabin, Harvard University Press.
- Radhie, Teuku Mohammad, 1988, *Politik Hukum dan Konsep Keadilan*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung Hal 206
- Reksodiputro, Marjono, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Buku II)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (LK-UI), Jakarta
- Reksodiputro Mardjono, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) Bab 7*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bab 1, Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Jakarta
- Rohcahyanto, Fitroh 2020, *Korupsi, Disparitas Pemidanaan & Perma No 1/2020*, Kanal KPK, Jakarta
- Salim, H.S, dan Nurbani Erlis Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sidharta, Arief, 2009, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam Soetanto Soepiadhy, *Perubahan Undang-Undang dasar 1945 Dalam Prospek Perkembangan Demokrasi*, Program Pasca Sarjana Untag, Surabaya
- Soetjipto, Adi. A, 1984, *Kesamaan dalam Pemidanaan*, Lokakarya Masalah Pemidanaan: Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia, IKAHI, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung.

- Simanjuntak, Osman, 1999, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Tak, Peter J. P, 2008, *The Dutch Criminal Justice System*. Wolf Publisher, Nijmegen.
- Tak, Peter J. P, 2012, “*The Dutch Prosecutor: A prosecuting and sentencing officer*” dalam Erik Luna dan Marianne L. Wade. Eds. *The Prosecutor in Transnational Perspective*. Oxford, New York.
- Tumpa, Harifin A, 2010, *Sistem Peradilan pidana di Negara Hukum Indonesia*, Ketua Mahkamah Agung, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2014, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

2. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Chasani, Muchammad, 2020, *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nurasiah, Mita, 2022, *Disparitas Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, *Jurnal*, Esensi Hukum Volume 4 No. 1, Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta
- Purnomo, Agung, 2021, *Pembaruan Tuntutan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi Program Doktor Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sangesti, Dinar Galuh, 2016, *Tinjauan Yuridis Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Wonosobo*, Tesis, Progam Magister FH Unissula. Semarang

3. Jurnal

- Gulo, Nimoreddi dan Muharram, Ade Kuniawan, *Disparitas Dalam Penjatuhan pidana (Masalah-Masalah Hukum) Jilid 47*, 2018.
- Ilyas, Adam, 2021, *Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang untuk Menentukan Tuntutan Pidana*, Pandecta Vol 16, Surabaya
- Putra, S.D.E, 2016, *Bingkai Keadilan Hukum Pancasila dalam Perspektif Hukum dan Relevansinya Dengan Keadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Saputra, Rony, *Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Republica Vol 16, No. 1, 2016.
- Wantu, Fence. M, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Mimbar Hukum Vol 19 No 3, 2007.

4. Internet

- Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kumparan, 29 Mei 2022. <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/eksistensi-asas-dominus-litis-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-1yA0HoUkV3r/4> diakses tanggal 10 September 2022
- Aida Mardatillah, *Landasan Pembentukan Perma Pemidanaan Perkara Tipikor*, 15 Agustus 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-landasan-pembentukan-perma-pemidanaan-perkara-tipikor--lt5f36c34aced9c?page=1> diakses tanggal 10 September 2022
- Aida Mardatillah, *Hindari Disparitas KPK Rampungkan Pedoman Tuntutan Tipikor*, 2020 <https://www.hukumonline.com/berita/a/hindari-disparitas-kpk-rampungkan-pedoman-penuntutan-perkara-tipikor--lt5f55f399cc999/?page=2> diakses tanggal 10 September 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pedoman> diakses tanggal 11 November 2022
- Andro Meda, 2017, *Sosiologi Hukum (Aliran Sociological Jurisprudence)*. http://akhyar13.blogspot.com/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html diakses tanggal 20 November 2022
- Mys, 2006, "Hanya Indonesia yang Punya Jenjang Rentut". Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/andi-hamzah-hanya-indonesia-yang-punya-jenjang-rentut-hol15445/> diakses tanggal 2 November 2023

5. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Kejaksaan Agung RI, 2002, Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus Buku 1-III, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.
Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.
Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE/003/A/JA/02/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi

6. Lainnya

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018, Surat Tuntutan Nomor 60/TUT.01.04/24/06/2018 tanggal 28 Juni 2018 atas nama Terdakwa Anang Sugiana Sudihardja, Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018, Surat Tuntutan Nomor 102/TUT.01.06/24/11/2018 tanggal 6 November 2018 atas nama Terdakwa Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung, Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021, Surat Tuntutan Nomor 110/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 atas nama Terdakwa Puput Tantriana Sari, Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021, Surat Tuntutan Nomor 95/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 atas nama Terdakwa Doddy Kurniawan, Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021, Surat Tuntutan Nomor 96/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 atas nama Terdakwa Muhammad Ridwan, Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022, Surat Tuntutan Nomor 65/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama Terdakwa Laode M Syukur Akbar, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022, Surat Tuntutan Nomor 68/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama Terdakwa Mochammad Ardian Noervianto, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022, Surat Tuntutan Nomor 51/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Terdakwa Abdul Gafur Masud, Jakarta

- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022, Surat Tuntutan Nomor 55/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Terdakwa Nur Afifah Balgis, Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022, Surat Tuntutan Nomor 43/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 28 April 2022 atas nama Terdakwa Rahmat Effendi, Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022, Surat Tuntutan Nomor 44/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 28 April 2022 atas nama Terdakwa Muhammad Bunyamin, Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022, Surat Tuntutan Nomor 45/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 28 April 2022 atas nama Terdakwa Mulyadi, Jakarta